

**STUDI KOMPARASI KOMPILASI HUKUM ISLAM DAN ORDINAN UNDANG-  
UNDANG KELUARGA ISLAM NEGERI SARAWAK TAHUN 2001 TENTANG  
PERSYARATAN DAN TATA CARA RUJUK.**

**SKRIPSI**

Oleh :

**SHHRIL AQMAL BIN BAHARIN**

**NIM. C41214140**



**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel**

**Fakultas Syari'ah dan Hukum**

**Jurusan Hukum Perdata Islam (Ahwal Al-Syaksiyyah)**

**Prodi Hukum Keluarga**

**SURABAYA**

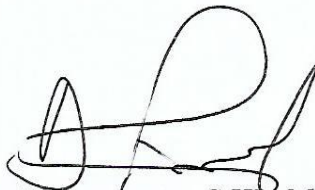
**2018**

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Shahril Aqmal Bin Baharin NIM. C41214140 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 20 Maret 2018

Pembimbing,



Dr. H. Darmawan, S.HI., M.HI.  
NIP. 198004102005011004

## PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Shahril Aqmal Bin Baharin, NIM: C41214140 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Selasa, tanggal 24 April 2018, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syari'ah.

### Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I



Dr. H. Darmawan, S.H.I., M.H.I.  
NIP. 198004102005011004

Penguji II



Dr. Hj. Dakwatul Chairah, M.Ag  
NIP. 195704231986032001

Penguji III



A. Mufti Khazin, MHI  
NIP. 197303132009011004

Penguji IV



Siti Tatmainnul Qulub, M.Si  
NIP. 198912292015032007

Surabaya, 27 April 2018

Mengesahkan,

Fakultas Syari'ah dan Hukum

Universitas Negeri Sunan Ampel

Dekan,



Prof. Dr. H. Sahid HM., M. Ag., M.H  
NIP. 196803091996031002

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Shahril Aqmal Bin Baharin  
NIM : C41214140  
Fakultas/Jurusan/Prodi : Syariah dan Hukum/Hukum Perdata Islam/Hukum  
Keluarga  
Judul Skripsi : Studi Komparasi Kompilasi Hukum Islam Dan  
Ordinan Undang-Undang Keluarga Islam Negeri  
Sarawak Tahun 2001 Tentang Persyaratan dan  
Tata Cara Rujuk

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah penelitian/karya penulis sendiri,  
kecuali pada bagian-bagian tertentu yang sudah dilengkapi dengan sumber rujukan.

Surabaya, 20 Maret 2018

Saya yang menyatakan,



SHahril AQMAL BIN BAHARIN  
NIM. C41214140





**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA**  
**PERPUSTAKAAN**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300  
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : SHAHRIL AQMAL BIN BAHARIN  
NIM : C41214140  
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Perdata Islam  
E-mail address : shahril.aqmal96@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Skripsi     Tesis     Desertasi     Lain-lain (.....)  
yang berjudul :

STUDI KOMPARASI KOMPILASI HUKUM ISLAM DAN ORDINAN UNDANG-  
UNDANG KELUARGA ISLAM NEGERI SARAWAK TAHUN 2001 TENTANG  
PERSYARATAN DAN TATA CARA RUJUK

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, April 2018

Penulis

(Shahril Aqmal Bin Baharin)

## ABSTRAK

Skripsi ini merupakan hasil penelitian lapangan yang berjudul “Studi Komparasi Kompilasi Hukum Islam dan Ordinan Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Sarawak Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Rujuk”. Adapun rumus masalah yang ada dalam penelitian ini adalah: Pertama, bagaimana persyaratan dan tata cara rujuk menurut Kompilasi Hukum Islam. Kedua, bagaimana persyaratan dan tata cara rujuk menurut Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Sarawak Tahun 2001. Ketiga, apa persamaan dan perbedaan kedua-dua undang-undang tersebut.

Penelitian ini merupakan penelitian pustaka (*library research*). Data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan metode kualitatif deskriptif-komparasi untuk mengetahui persyaratan dan tata cara rujuk yang dijalankan menurut Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Sarawak Tahun 2001 serta persamaan dan perbedaan antara kedua-duanya.

Persyaratan dan tata cara rujuk yang dijalankan menurut Kompilasi Hukum Islam dan Ordinan Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Sarawak Tahun 2001 haruslah dicatat dan diperiksa dengan teliti berkaitan persyaratan rujuk menurut kedua undang-undang tersebut. Hasil penelitian menyimpulkan ada persamaan dan perbedaan antara persyaratan dan tata cara rujuk menurut kedua undang-undang tersebut. Persamaan antara keduanya adalah dari pengertian rujuk itu sendiri bermaksud yaitu suami dapat merujuk kembali istrinya dalam masa idah talak *raj'i*. Perbedaan yang cukup jelas dari tata cara rujuk menurut kedua undang-undang tersebut adalah keterlibatan saksi. Contohnya menurut Kompilasi Hukum Islam kesaksian dari rujuk adalah sangat diperlukan manakalah kesaksian bagi rujuk menurut Ordinan Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Sarawak adalah tidak diperlukan berdasarkan alasan tertentu di tambah pula terdapat sangsi yang dikenakan bagi pasangan yang tidak mencatatkan rujuk yang telah berlaku dalam tempoh waktu tertentu dan mediasi turut dijalankan bagi pengajuan di tingkat Mahkamah Syariah bagi istri yang setuju dan tidak setuju dengan ikrar rujuk dari suami. Sedangkan alur tata cara rujuk menurut Kompilasi Hukum Islam dijalankan di Kantor Urusan Agama (KUA) dan Ordinan Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Sarawak Tahun 2001 dijalankan di Jabatan Agama Islam Negeri Sarawak (JAIS).

Tentunya perbedaan ini mempunyai kekurangan maupun kelebihan dalam melaksanakan rujuk, disini penulis mengharapkan agar kiranya skripsi ini menjadi bahan referensi bagi Kantor Urusan Agama dan Jabatan Agama Islam Sarawak, agar kiranya tata cara rujuk bisa berjalan secara efektif dan efisien.















































Pada zaman penjajahan Belanda, hukum Islam diakui oleh pemerintah Hindia Belanda secara tertulis dengan istilah *godsdiensstige wetten* (undang-undang agama tentang hukum adat pada abad ke 19), sebagaimana terlihat pada pasal 75 (lama) *Regeering Reglemen* tahun 1855. Kemudian ditegaskan dalam pasal 78 ayat 2 *Regeering Reglemen* 1855 yang menyatakan bahwa dalam hal terjadi perkara perdata antara sesama orang Bumiputra, atau dengan mereka yang disamakan dengan Bumiputra, maka mereka tunduk pada putusan hakim agama atau kepala masyarakat mereka yang menyelesaikan masalah itu menurut undang-undang agama atau ketentuan mereka. Peradilan yang diperuntukkan bagi mereka yang telah ditentukan yaitu *Priesterraad* (Peradilan Agama), sebagaimana tercantum dalam *Staatsblad* (lembaran Negara) 1882 Nomor 152 Pasal 1 dinyatakan: “di samping setiap *Lanandraad* di Jawa dan Madura diadakan satu *Pengadilan Agama* yang wilayah hukumnya sama dengan wilayah hukum *Landraad* (*Pengadilan Negeri*)”. Dulunya *Pengadilan Agama* disebut dengan nama *Priesterraad* yang artinya “*Majlis Padri*”. Nama ini sebenarnya keliru, sebab dalam agama Islam tidak ada *Padri*. *Padri* atau *Paderi* dimaknakan sebagai pendeta Khatolik atau pendeta Kristen atau peperangan yang terjadi di Sumatra Barat pada 1921-1927.

Pada mulanya *Staatsblad* 1882 No. 152 belum ada ketentuan tentang kekuasaan *Pengadilan Agama*; pengadilan ini sendiri menetapkan perkaraperkara yang dipandang masuk dalam lingkungan kekuasaannya,





















- c) *Bidayah al-Mujtahid.*
  - d) *Al-Umm.*
  - e) *Bughyatul Mustarsyidien.*
  - f) *Aqidah wa Syari'ah.*
4. IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta:
- a) *Al-Muhalla.*
  - b) *Al-Wajiz.*
  - c) *Fath al-Qadier.*
  - d) *Alfiqh Ala Madzahib al-Arba'ah.*
  - e) *Fiqh al-Sunnah.*
5. IAIN Sunan Ampel Surabaya:
- a) *Kasyaf al-Qina.*
  - b) *Majmu'atu Fatawi.*
  - c) *Qawanin Syal'ah lis Sayid Usman bin Yahya.*
  - d) *Al-Mughni.*
  - e) *Al-Hidayah Syarah Bidayah al-Mubtadi.*
6. IAIN Alauddin Ujung Pandang:
- a) *Qawanin Syari'iyah Sayid Sudaqah Dahlan.*
  - b) *Nawab al-Jalil.*
  - c) *Syarh Ibn 'Abidin.*
  - d) *Al-Muwattha'.*
  - e) Hasyiah Syamsuddin Moh. Irfat Dasuki.
7. IAIN Imam Bonjol Padang:













































- b. Membantu pelaksanaan tugas pemerintah di tingkat kecamatan dalam bidang keagamaan.
- c. Bertanggungjawab atas pelaksana tugas Kantor Urusan Agama kecamatan.
- d. Melaksanakan tugas koordinasi penilik agama, penyuluh agama islam dan koordinasi/kerjasama dengan instansi lain yang erat hubungannya dengan pelaksanaan tugas kua kecamatan.
- e. Selaku PPAIW (Pegawai Pencatat Akta Ikrar Wakaf)

Melalui Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 18 Tahun 1975 Juncto Keputusan Menteri Agama Nomor (KMA) 517 Tahun 2001 dan PP Nomor 6 Tahun 1988 tentang Penataan Organisasi Kua Kecamatan secara tegas dan lugas telah mencantumkan tugas kua yaitu:

- a. Melaksanakan sebagian tugas Kantor Kementerian Agama Kabutapen/ Kota di bidang urusan agama Islam dalam wilayah kecamatan. Dalam hal ini KUA menyelenggarakan kegiatan dokumentasi dan statistik (dokitik), surat menyurat, pengurusan surat, kearsipan, pengetikan dan rumah tangga:
- b. Mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan dan melaksanakan kegiatan sectoral maupun lintas sectoral di wilayah kecamatan. Untuk itu, kua me;laksanakan pencatatan pernikahan, mengurus dan membina























- c. Enakmen Kanun Jenayah Syariah
- d. Enakmen Atur Cara Mal
- e. Enakmen Atur Cara Jenayah
- f. Enakmen Pentadbiran Hukum Syarak

Khusus di Sarawak, langkah pemecahan tersebut telah menghasilkan enam (6) Ordinan Yaitu Ordinan Mahkamah Syariah Tahun 1991, Ordinan Undang-Undang Keluarga Islam Tahun 1991, Ordinan Kesalahan Jenayah Syariah Tahun 1991, Ordinan Acara Mal Syariah Tahun 1991, Ordinan Kanun Acara Jenayah Syariah Tahun 1991 dan Ordinan Keterangan Syariah Tahun 1991.

Manakala di bidang kekeluargaan, Dewan Undangan Negeri Sarawak melalui Badan Perundangan Sarawak telah melakukan amandemen terhadap Ordinan Undang-Undang Keluarga Islam Sarawak Tahun 1991. Pada tanggal 5 November tahun 2001 Dewan Undangan Negeri Sarawak telah meluluskan Ordinan Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Sarawak Tahun 2001. Pada tanggal 27 Desember 2001 undang-undang tersebut telah diterbitkan dengan persetujuan Yang di-Pertuan Negeri Sarawak (Gubenu). Dengan demikian, Ordinan Undang-Undang Keluarga Islam Sarawak Tahun 2001 telah secara resmi menggantikan Ordinan Undang-Undang Keluarga Islam Sarawak yang lama. Pasal 141 (1) Ordinan Undang-Undang Keluarga Islam Sarawak Tahun















Keluarga Islam Negeri Sarawak Tahun 2001. Bagi pendaftaran kasus rujuk di Sarawak, Malaysia terdapat beberapa tata cara yang harus diikuti oleh pihak-pihak yang terkait iaitu suami dan istri. Pendaftar Nikah Cerai dan Rujuk (PNCR) berwenang untuk melihat kepada kasus rujuk ini bagi memastikan sama ada rujuk boleh dicatatkan mengikut tata cara yang ditetapkan atau diarahkan supaya menikah semula. Prosedur biasa bagi pasangan yang ingin rujuk selepas berlaku perceraian adalah perlu mengisi borang permohonan rujuk yang ditetapkan serta mengemukakan bukti perceraian sama ada perintah perceraian yang dikeluarkan oleh Mahkamah Syariah atau Surat Perakuan Cerai yang didaftar di mana-mana Pejabat Agama Islam Negeri. Maka Pendaftar Nikah Cerai dan Rujuk akan membuat siasatan yang perlu terhadap pihak-pihak yang mahu bersama kembali. Perkara yang akan disiasat oleh Pendaftar Nikah Cerai dan Rujuk adalah melihat tempoh 'iddah pihak isteri sama ada sudah tamat atau belum. Sekiranya Pendaftar Nikah Cerai dan Rujuk berpuas hati terhadap keterangan dokumen dan keterangan pasangan itu dan tiada halangan yang membolehkan mereka tidak bersama maka rujuk bolehlah dilakukan. Tata cara rujuk di Negeri Sarawak mengkehendaki pasangan melakukan rujuk di hadapan Pendaftar Nikah Cerai dan Rujuk. Selepas berpuas hati terhadap dengan lafaz rujuk yang dibuat oleh suami kepada pihak istri maka rujuk

bolehlah didaftarkan. Pasangan yang kembali bersama sebagai suami isteri akan diarahkan untuk menyerahkan Surat Perakuan Cerai atau perintah perceraian yang dikeluarkan oleh Mahkamah Syariah kepada Pendaftar Nikah Cerai dan Rujuk. Pendaftar Nikah Cerai dan Rujuk kemudian membatalkan Surat Perakuan Cerai, seterusnya merekodkan rujuk serta Surat Perakuan Rujuk akan dikeluarkan kepada pihak-pihak selepas mengikut tata cara yang ditetapkan oleh Jabatan Agama Islam Sarawak (JAIS). Pengeluaran Surat Perakuan Rujuk hanya akan dikeluarkan dalam tempoh tujuh hari dari tarikh pembayaran tata cara rujuk, dan pihak-pihak boleh mengambil Surat Perakuan Rujuk seperti yang dikehendaki bagi menggantikan Surat Perakuan Cerai.

Seksyen 50 (8) Hidup Semula Sebagai Suami Istri Atau Ruju yang menyatakan; jika selepas talak raj'i suami melafazkan ruju dan istri telah bersetuju terhadap ruju itu, istri boleh, atas permohonan suami, diperintahkan oleh mahkamah supaya hidup semula sebagai suami istri, melainkan jika istri itu menunjukkan sebab-sebab yang baik mengikut Undang-Undang islam sebaliknya, dan, jika demikian halnya, mahkamah hendaklah melantik suatu jawatankuasa perdamaian sebagaimana yang

























pihak-pihak ingin melakukan rujuk, maka pasangan akan dipanggil dihadapan Pendaftar Nikah Cerai dan Rujuk, dan lafaz rujuk akan dilafazkan di hadapan Pendaftar Nikah Cerai dan Rujuk seperti yang dikehendaki. Pelafazan rujuk yang dibuat hanyalah cukup di hadapan Pendaftar Nikah Cerai dan Rujuk tanpa kehadiran saksi. Perkara ini dilihat lebih praktikal pada masa kini di Sarawak kerana kemaslahatan pasangan lebih mudah tercapai dan tidak merumitkan. Dalam seksyen Ordinan Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Sarawak Tahun 2001 tidak dinyatakan sama sekali berkenaan dengan kesaksian dalam hal rujuk. Walau bagaimanapun kesaksian boleh diterima pakai dalam hal pengesahan rujuk yang dibuat di Mahkamah Syariah berdasarkan Akta Keterangan Mahkamah Syariah. Bagi hal pengesahan rujuk di Mahkamah Syariah dilihat kesaksian merupakan perkara yang lebih praktikal dalam mencapai keadilan untuk melihat sejauh mana kesahan rujuk yang dibuat.

## 2. Proses mediasi

Pada dasarnya proses mediasi atau perdamaian bagi kasus rujuk yang dijalankan menurut Ordinan 43 Keluarga Islam Negeri Sarawak di Mahkamah Syariah atau Pengadilan Agama di Sarawak. Proses mediasi dijalankan apabila isteri tidak rela untuk hidup bersama semula sebagai suami istri, maka rujuk di hadapan Pendaftar Nikah Cerai dan Rujuk tidak akan dilakukan. Pendaftar Nikah Cerai dan







Kompilasi Hukum Islam adalah peraturan yang berlaku diseluruh bagian di Indonesia. Penyusunan Kompilasi Hukum Islam (KHI) dipandang sebagai suatu proses transformasi hukum Islam dari bentuk hukum tidak tertulis ke dalam bentuk hukum yang tertulis, yaitu perundang-undangan. Proses perumusan Kompilasi Hukum Islam dilakukan dengan: (1) Pengkajian kitab-kitab fiqih, (2) Wawancara dengan para ulama, (3) Yurisprudensi Pengadilan Agama, (4) Studi perbandingan hukum dengan negara lain, dan (5) Lokakarya/seminar materi hukum untuk Pengadilan Agama. Tujuan untuk penyusunan KHI adalah untuk menyiapkan sebuah pedoman hukum bagi para hakim di lingkungan Peradilan Agama, dan menjadi hukum positif yang harus dipatuhi oleh seluruh warga Indonesia yang beragama Islam.

Ordinan Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Sarawak 2001 merupakan undang-undang di bidang keperdataan yang hanya berlaku di Sarawak, Malaysia. Ordinan ini merupakan rangkaian Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Sarawak yang biasa digunakan sebagai referensi pada Mahkamah Syariah Negeri Sarawak dan Jabatan Agama Islam Sarawak (JAIS) di bagian Kemajuan Keluarga. Di dewan Undangan Negeri Sarawak melalui Badan Perundangan Sarawak telah melakukan amendemen terhadap Ordinan Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Sarawak Tahun 1991. Pada tanggal 27 Desember 2001 undang-undang tersebut telah









- Sholahudin, Mohammad Bin Abu Bakar. *Ekeftifitas Mahkamah Syariah*. Kuala Lumpur: Utusan Publications & Distributors Sdn. Bhd, 2004.
- Mahmud, Zuhdi, Abd. Majid. *Penghantar Undang-Undang Islam Di Malaysia*. Selongor: Dewan Bajasa Dan Pustaka, 1992.
- Hakim, Rahmat. *Hukum Perkawinan Islam*. Bandung: Pustaka Setia:2000.
- Rahim, Rohani Abdul. *Undang-Undang Islam Asia Tenggara*. Kuala Lumpur: Karya Abazie, 1989.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah Jilid 8*. Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1997.
- Poerwadarminta, WJS. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka,1986.
- Wan, Arfah Hamzah. *A First Look At The Malaysian*. Kuala Lumpur: MDC Publishers Sdn. Bhd, 2003.
- Zulkifli, Mohamad. *Kekeluargaan Islam Dalam Fiqh Al Syafi'i*. Selangor: Darul Syakir,2014.
- Zaini, Nasohah. *Pentadbiran Undang-Undang Islam Di Malaysia Sebelum Dan Sesudah Merdeka*. Kuala Lumpur: Yayasan Islam Terengganu, 2001.
- Zakiah, Daradjat. *Ilmu Fiqh Jilid 2*. Yogyakarta: PT Dhana Bhakti Wakaf, 1995.
- Badan Perundangan Sarawak. *Ordinan Undang-Undang Keluarga Islam Tahun 2001*. Kuching: Pencetakan Nasional Malaysia Berhad, 2001.
- Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2004.
- Depag RI. *Tugas-Tugas Pejabat Pencatat Nikah, Bimbingan Masyarakat Islam Dan Penyelenggaraan Haj*. Jakarta: Departemen Agama RI, 2004.
- Pedoman Pegawai Pencatat Nikah. *Projek Peningkatan Tenaga Keagamaan*. Jakarta: Departemen RI, 2004.







